

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sebagai salah satu aktivitas pembangunan, bidang ekonomi dan merupakan prioritas diantaranya sektor Usaha Kecil dan Menengah yang terus diupayakan. Di pemerintahan Kota Bandung, sejalan dengan hal tersebut dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No.12 Tahun 2002 tentang perindustrian dan tata cara pemberian izin usaha perindustrian, izin usaha perdagangan, wajib daftar perusahaan dan tanda daftar gudang.

Untuk merealisasikan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Bandung mempunyai strategi mengenai pembangunan di sektor Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang handal dan religius yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup perekonomian Kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
3. Mengembangkan sosial budaya kota yang ramah dan berkesadaran yang tinggi, serta berhati nurani yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenaga kerjaan.

4. Meningkatkan penataan Kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan saranakota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung kota.

Selain itu Pemerintah Kota Bandung mempunyai arah tujuan dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, atau kerajinan di Kota Bandung yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan struktur industri dalam upaya menunjang pembangunan industri.
2. Mewujudkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang maju dan mandiri dalam upaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga mampu memasuki pasar global.
3. Mendorong upaya perluasan lapangan kerja.
4. Meningkatkan mutu produk agar dapat bersaing dengan Negara lain dipasar internasional sehingga dapat memperoleh devisa Negara yang lebih besar.

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kota Bandung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No.05 Tahun 2001 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Dalam mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah pada dasarnya sudah dilakukan sejak lama oleh pemerintah baik secara nasional maupun regional dengan melaksanakan berbagai program yang tujuannya untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah diantaranya : Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Usaha Kecil (KUK), Lingkungan Industri Kecil

(LIK). Namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai sejumlah permasalahan yang menyebabkan tujuan dari upaya-upaya tersebut tidak tercapai secara optimal.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah dalam upaya merealisasikan pengembangan usaha kecil dan menengah guna membangun sifat kemandirian masyarakat dalam hal peningkatan kualitas serta kesejahteraan hidupnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah No.02 Tahun 2001, yang menjadi acuan dan arah dalam pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan keterkaitan antara sistem industri, penciptaan iklim usaha yang mendukung investasi serta pemanfaatan teknologi untuk peningkatan nilai tambah industri.
2. Peningkatan sistem perdagangan yang berorientasi pada pola kemitraan antara pedagang besar, menengah dan kecil.
3. Menumbuhkan dan mengembangkan dunia usaha yang diharapkan mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi.
4. Mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu kepada mekanisme pasar dan jaminan adanya prinsip persaingan usaha yang sehat, dan terjaminnya perlindungan hak-hak konsumen sesuai perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan peluang usaha yang seluas-luasnya melalui regulasi perijinan usaha yang bersifat transparan.

Pengertian dari UKM itu sendiri adalah usaha yang memproduksi barang dan jasa yang menggunakan bahan baku utamanya berbasis pada pendayagunaan pada sumber daya alam, bakat dan karya seni tradisional dari daerah itu sendiri.

Adapun ciri-ciri atau kriteria dari UKM itu sendiri, antara lain:

1. Bahan baku mudah diperoleh.
2. Menggunakan teknologi sederhana.
3. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun.
4. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
5. Peluang pasar cukup luas , sebagian besar produknya terserap di pasar lokal.
6. Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat.
7. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat.
8. Secara ekonomis menguntungkan.

Pengembangan usaha kecil dan menengah sangat penting artinya bagi keberhasilan pengembangan ekonomi yang sekarang sedang digalakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan untuk mencapai hal tersebut perlu adanya koordinasi antara pengembang dan yang dikembangkan. Keberadaan UKM di Kota Bandung saat ini telah menjadi bagian penting dalam upaya membangun perekonomian kota yang berdaya saing tinggi, sehingga posisinya tidak tergantikan oleh lembaga ekonomi manapun. Bahkan saat krisis moneter di Tahun 1997 karena kegiatannya berbasis ekonomi kerakyatan, koperasi dan UKM tidaklah banyak terpengaruh.

Atas dasar ini, maka dalam pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan, memberikan motivasi dan pengarahan kepada seluruh pelaku usaha koperasi dan UKM untuk lebih meningkatkan profesionalismenya dalam membangun jaringan usaha yang lebih solid termasuk membangun kemitraan baik dengan BUMN, BUMD dan kalangan perbankan.

**Tabel. 1.1**  
**Potensi Usaha Kecil dan menengah Kota Bandung Sampai dengan Tahun 2015**

No	Jenis Usaha	JML Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nlai Penjualan
<b>A. Usaha pertanian dan hasil hutan</b>				
1	Usaha kayu/kusen	40	160	3.698.095
2	Mebeuler	100	400	120.000.000
3	Usaha depot air minum	150	400	2.520.000
4	Usaha makanan dan minuman	7.346	22.038	634.694.400
<b>Jumlah</b>		<b>7.636</b>	<b>22.998</b>	<b>760.912.495</b>
<b>B. Usaha sandang dan kulit</b>				
1	Usaha Tekstil da produk tekstil	221	834	1.749.574
2	Usaha Rajutan	400	3.520	3.556.000
3	Usaha Kaos suci	153	647	19.152.000
4	Usaha Bordir	52	165	1.655.450.000
5	Usaha Alas kaki	335	3.556	4.043.700
6	Usaha Tas	120	480	7.561.621
7	Usaha Topi	26	104	1.040.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.307</b>	<b>9.306</b>	<b>1.692.552.895</b>
<b>C. Kimia dan Bahan Bangunan</b>				
1	Usaha Kimia dan bahan bangunan	38	192	4.029.350
2	Usaha daur ulang plastik	20	60	480.000
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>	<b>252</b>	<b>4.509.350</b>
<b>D. Usaha Aneka dan Elektronika</b>				
1	Usaha Boneka	90	450	6.642.083
2	Usaha Kerajinan	57	361	4.432.500

3	Usaha Kemasan dus	20	60	1.440.000
4	Usaha Benang, gelas dan layangan	54	261	1.947.400
<b>No</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>JML Unit Usaha</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>Nlai Penjualan</b>
5	Usaha Elektronika	18	153	674.750
<b>Jumlah</b>		<b>239</b>	<b>1.240</b>	<b>15.136.733</b>
<b>E. Usaha Logam, Mesin, Perakayasaan dan alat angkut</b>				
<b>1</b>	Usaha Karet	55	277	3.243.250
<b>2</b>	Usaha Spare Part mesin dan otomotif	150	450	22.214.117
<b>3</b>	Usaha Alat perabot dapur	35	105	1.678.666
<b>4</b>	Usaha Alat pertanian	18	88	615.500
<b>5</b>	Usaha Logam lampu hias	23	112	1.348.700
<b>6</b>	Usaha Perbengkelan	200	600	24.000.000
<b>7</b>	Usaha Las/bubut	300	900	72.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>781</b>	<b>2.532</b>	<b>125.100.233</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>10.021</b>	<b>36.328</b>	<b>2.598.211.706</b>

*Sumber Data : Disperindag Tahun 2015*

Dalam perkembangan usaha kecil dan menengah di Kota Bandung dirasakan perkembangannya semakin menurun, dan berdasarkan observasi awal di lapangan, peneliti menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sasaran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM , Perindustrian Perdagangan dalam program pengembangan sektor Industri Kecil dan Menengah di Kota Bandung.
2. Terbatasnya penggunaan alat produksi.
3. Kurangnya wawasan, pengetahuan dan kreativitas yang dimiliki pelaku Industri Kecil dan Menengah.

4. Masih kurangnya kondisi lingkungan yang digunakan oleh pelaku Industri Kecil dan Menengah bila dikaitkan dengan kebersihan dan kenyamanan dalam kegiatan produksi.
5. Kurangnya pemotivasian yang dilakukan oleh aparat Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan, kepada pelaku Industri Kecil dan Menengah dalam rangka pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kota Bandung.
6. Belum maksimalnya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan dengan instansi - instansi lain yang terkait.

Masalah tersebut didalam penelitian ini akan diteliti dengan menghubungkan variable koordinasi yang dilakukan oleh dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan dengan dinas-dinas lain di instansi yang terkait, karena keberhasilan suatu program terutama dalam pengembangan industri kecil dan menengah tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan tersebut, tetapi dalam berbagai aktivitas bersentuhan dengan dinas-dinas daerah dan instansi lain yang memiliki objek dan unsur pemerintahan yang sama. Selain dari itu didalam perda No 05 Tahun 2001 tentang pembentukan dinas UKM, dijelaskan bahwa Dinas UKM berusaha untuk mengupayakan peningkatan kegiatan perekonomian kota yang berbasiskan potensi daerah yang memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi.

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Pengaruh Koordinasi Terhadap Efektivitas Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari fenomena serta permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan melalui bentuk pertanyaan penelitian berikut ini: seberapa besar pengaruh koordinasi kepala dinas koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan terhadap efektivitas pengembangan UMKM Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk menggambarkan pengaruh koordinasi kepala dinas koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan terhadap efektivitas pengembangan UMKM Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

Sedangkan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh koordinasi kepala dinas koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan terhadap efektivitas pengembangan UMKM Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung



#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya bidang Ilmu Pemerintahan dengan kajian koordinasi pemerintahan sebagai bagian dari fokus perhatian manajemen pemerintahan..

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan (referensi) bagi para pihak yang terkait, dalam hal ini masyarakat yang berperan sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perindustrian dan perdagangan, sebagai upaya alternatif dalam pengembangannya.